

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.4, No.1, April 2020, pp. 1 – 10

ISSN2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage:<http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

## ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU

MUHAMMAD BAYU

[mbayoc@gmail.com](mailto:mbayoc@gmail.com)

ANDRE SANTOSO SAM

[andre.santoso212@gmail.com](mailto:andre.santoso212@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

### ABSTRAK

*Stakeholder dari organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik adalah warga negara dari negara tersebut. Setiap tahun organisasi pemerintah menyusun anggaran baru sebagai dasar arus kas pemerintah di tahun berikutnya. Alokasi anggaran dibuat untuk memastikan semua sumber daya yang diterima dari warga negara dialokasikan dengan benar. Mengukur kinerja pemerintah melalui laporan keuangan yang diterbitkan pemerintah setiap tahun secara khusus realisasi anggaran pemerintah daerah (pendapatan dan hasil anggaran). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja manajemen keuangan pada pemerintah daerah di Kabupaten Berau. Metodologi analisis data menggunakan analisis deskriptif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Value for Money termasuk Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan rasio ekonomis dalam 6 tahun adalah rasio ekonomis, rasio efisiensi dalam 6 tahun efisien dengan fluktuasi, dan rasio efektivitas dalam 6 tahun itu sendiri dengan perubahan yang efektif.*

*Kata Kunci: Ekonomis, Efisiensi dan Efektif.*

### ABSTRACT

*Stakeholder of the government organization or the public sector organization is a citizen of that country. Every year government organizations compose a new budget as the basis for cash flow government in the next year. The budget allocation was created to make sure all the resources received from a citizen is properly allocated. Measuring the performance of the government through the financial statement that the government publishes every year specifically Realized local government budget (budget incomes and outcomes). The purpose of this research to know the performance of financial management in the local government in Berau Regency. Data analysis methodology using descriptive analysis. The analysis tool applied in this research is Value for Money including Economical Ratio, Efficiency Ratio, and Effectiveness Ratio. The result shows the economical ratio within 6 years is economical, the*

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.4, No.1, April 2020, pp. 1 – 10

ISSN2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage:<http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

*efficiency ratio within 6 years is efficient with fluctuation, and the effectiveness ratio within 6 years itself is effective with changes.*

*Keywords: Economical, Efficiency, and Effectiveness*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai tanggal 1 Januari 2001 telah membawa peradaban yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang utama misalnya adalah perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi di pemerintahan, perubahan dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja, dari sistem akuntabilitas vertikal menjadi system akuntabilitas horizontal, dari sistem akuntansi *single entry* dan *cash basis* menjadi *double entry* dan menuju *accrual basis*. Selain itu juga telah terjadi modernisasi dalam sistem manajemen publik dan pemerintahan yang lebih menekankan pada prinsip kinerja, ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money*) misalnya dengan mulai diadopsinya sebagian konsep *New Publik management* dan *Reinventing Government*.

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan,

mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Pemerintah daerah memiliki hak otonomi daerah dalam menentukan perencanaan keuangan/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang dapat mengembangkan perekonomian suatu daerah.

Dalam menilai seberapa efektif dan efisien pelaksanaan keuangan yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah maka, diperlukan suatu alat pengukuran kinerja pemerintah daerah yaitu *value for money*. Akuntabilitas itu sendiri itu adalah bagaimana kemampuan pemerintah mengelola uang publik secara ekonomis, efisien dan efektif berdasarkan konsep *value for money*. Diartikan sebagai setiap uang yang dibelanjakan oleh pemerintah harus berdampak dan memenuhi kepentingan publik sesuai dengan tuntutan publik, serta dapat dipertanggung jawabkan.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.4, No.1, April 2020, pp. 1 – 10

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efektif adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang diterapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Implementasi dari *value for money* ini penting bagi pemerintah daerah karena kegiatan pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat, diharapkan manfaat yang akan didapat dari implementasi *value for money* adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dengan harapan pelayanan yang diberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya in-efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*, Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Pemerintah daerah Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Berau sendiri dari tahun 2013 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

dan pada tahun 2016 kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berbeda dengan

tahun sebelumnya di tahun 2014 hingga 2015 dan 2017 hingga 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun permasalahan yang menyebabkan opini WDP dari BPK pada tahun 2013 adalah masih masalah seputar pengelolaan, penata usahaan dan pelaporan nilai persediaan belum memadai serta penyajian aset tetap yang belum memadai dan Pada tahun 2016 adanya penganggaran proyek yang dimana uang telah digunakan tetapi barangnya belum ada.

Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau mengalami kenaikan pada tahun 2013 hingga 2015 ,lalu mengalami penurunan pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan.

Tabel 1. Realisasi pendapatan APBD tahun 2013 - 2018

Tahun	Realisasi Pendapatan
2013	Rp. 1.794.416.064.921,00
2014	Rp. 2.081.495.223.636,58
2015	Rp. 2.287.982.923.615,35
2016	Rp. 1.927.799.908.764,95
2017	Rp. 1.945.595.742.647,61
2018	Rp. 2.130.946.375.802,13

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Tahun 2019

Masyarakat tentu menghendaki adanya pertanggungjawaban mengenai kinerja sektor publik, termasuk kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam pengelolaan keuangannya.

Maka dari uraian diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.4, No.1, April 2020, pp. 1 – 10

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

“Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* Pemerintah Daerah Kabupaten Berau”

## METODE PENELITIAN

Untuk memberikan penjelasan mengenai indikator-indikator dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi operasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ekonomi yang dimaksud adalah tingkat biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemerintahan dimana untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dapat meminimalisir pengeluaran/belanja yang digunakan serta menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi yang dimaksud adalah penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi itu merupakan perbandingan antara output dan input. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah.
3. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan

perbandingan outcome dengan output. Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan.

4. *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dan khususnya pengelolaannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
5. *Good Governance* adalah penciptaan pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Berau.

## Unit Analisis

Penelitian ini mengambil unit analisis, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang beralamat di Jl. APT. Pranoto No.1 Tanjung Redeb 77311

## Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang merupakan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. Data kuantitatif yang berupa angka-angka mengenai laporan

anggaran dan realisasi pemerintah daerah

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.4, No.1, April 2020, pp. 1 – 10

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Kabupaten Berau.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang diolah oleh pihak pemerintah dalam bentuk laporan-laporan dan dokumen-dokumen tertulis. Sumber data secara keseluruhan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten.

## Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku-buku atau literatur, jurnal atau penelitian ilmiah untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dan mencakup cara mengukur kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan prinsip *value for money*.

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 – 2018.

## Alat Analisis

Metode Analisis yang digunakan di penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dalam bentuk studi kasus yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan.

## ANALISIS

### 1. Tingkat Ekonomis

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013- 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maka dapat dilakukan perhitungan tingkat ekonomis sebagai berikut :

No	Tahun	Anggaran Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran	Rasio Ekonomis
1	2	3	4	$\frac{5}{(4/3)} * 100\%$
1	2013	3,109,592,879,263	1,722,880,788,306	55%
2	2014	3,482,976,000,000	2,257,729,169,564	65%
3	2015	3,796,225,207,200	2,786,759,263,925	73%
4	2016	2,627,091,183,400	2,061,913,210,397	78%
5	2017	2,249,102,692,800	1,571,269,467,648	70%
6	2018	2,420,428,284,600	1,809,699,772,184	75%
7	Rata-rata	2,947,569,374,544	2,035,041,945,337	69%

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.4, No.1, April 2020, pp. 1 – 10

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

## 2. Tingkat Efisiensi

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013-2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maka dapat dilakukan perhitungan tingkat efisiensi sebagai berikut :

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Pengeluaran	Rasio Efisiensi
1	2	3	4	$5 = (4/3) * 100\%$
1	2013	1,904,809,750,328	1,722,880,788,306	90%
2	2014	2,364,490,676,785	2,257,729,169,564	95%
3	2015	2,215,275,603,439	2,786,759,263,925	126%
4	2016	2,001,188,086,730	2,061,913,210,397	103%
5	2017	1,857,713,219,723	1,571,269,467,648	85%
6	2018	2,319,719,448,128	1,809,699,772,184	78%
7	Rata-rata	2,110,532,797,522	2,035,041,945,337	96%

## 3. Tingkat Efektivitas

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013-2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maka dapat dilakukan perhitungan tingkat efektivitas sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas
1	2	3	4	$5 = (3/4) * 100\%$
1	2013	1,904,809,750,328	1,794,416,064,921	106%
2	2014	2,364,490,676,785	2,081,495,223,637	114%
3	2015	2,215,275,603,439	2,287,982,923,615	97%
4	2016	2,001,188,086,730	1,927,799,908,765	104%

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.4, No.1, April 2020, pp. 1 – 10

ISSN2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage:<http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

5	20 17	1,857,71 3,219,72 3	1,945,59 5,742,64 8	95%
6	20 18	2,319,71 9,448,12 8	2,130,94 6,375,80 2	109%
7	Rat a- rat a	2,110,53 2,797,52 2	2,028,03 9,373,23 1	104%

## Pembahasan

### 1. Rasio Ekonomis

Tabel 4 menggambarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau berdasarkan konsep *value for money* yang salah satunya terdiri dari rasio ekonomis. Rasio ekonomis mengalami kenaikan dan penurunan dari rentang tahun 2013-2018. Tahun anggaran 2013 rasio ekonomis mencapai 55%. Tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar 10%. Tahun anggaran 2015 mengalami

kenaikan sebesar 8%. Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5%. Pada tahun anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar 8% dibandingkan periode lalu. Tahun anggaran 2018 kembali naik menjadi 75%. Adapun tahun anggaran 2013-2018 dengan rata-rata rasio ekonomisnya adalah 69%. Pemerintah daerah Kabupaten Berau disimpulkan ekonomis berdasarkan hasil perhitungan ekonomis yang menunjukkan bahwa 69% rata-rata

dari seluruh anggaran yang dihitung. Pemerintah Kabupaten Berau menggunakan anggaran dengan disiplin dimana pada saat memulai program pemerintah yang akan dilaksanakan tidak terjadi pemborosan dan penggunaan belanja operasi. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja operasional lebih kecil dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa pengeluaran yang terjadi tidak boros dan terkendali. Tahun anggaran 2013 menjadi tahun yang terbaik karena menghasilkan rasio ekonomis sebesar 55% dan dikatakan ekonomis.

### 2. Rasio Efisiensi

Tabel 5 menggambarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau berdasarkan konsep *value for money* yang salah satunya terdiri dari rasio efisiensi. Rasio efisiensi mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun 2013-2018. Tahun anggaran 2013 rasio efisiensi

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.4, No.1, April 2020, pp. 1 – 10

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

mencapai 90%. Tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar 5%, Tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar 31%. Tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 23%. Tahun anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar 18%. Tahun anggaran 2018 penurunan lagi sebesar 77%. Adapun tahun anggaran 2013-2018 dengan rata-rata rasio efisiensinya adalah 96% dari seluruh anggaran yang dihitung. Pemerintah Kabupaten Berau dinilai cukup efisien serta cukup mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan mengefisiensikan pengeluaran untuk mencapai target yang dicapai.

### 3. Rasio Efektivitas

Tabel 6 menggambar analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau berdasarkan konsep *value for money* yang salah satunya terdiri dari rasio efisiensi. Rasio efisiensi mengalami kenaikan dan penurunan dari rentang tahun 2013-2018. Tahun anggaran 2013 rasio efektivitas sebesar 106%. Tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar 8%. Tahun anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 17%. Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 7%. Tahun 2017 mengalami penurunan

sebesar 9%. Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 14%. Adapun tahun anggaran 2013-2018 dengan rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 104% dari seluruh anggaran yang dihitung. Pemerintah Kabupaten Berau dapat dikatakan cukup jika dilihat dari segi efektivitas, karena masih adanya rasio yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau juga telah berhasil melaksanakan program-program dengan baik untuk meningkatkan kinerja. Program yang dilakukan antara lain upaya peningkatan pajak daerah, pajak daerah yang terdiri atas pajak hotel/homestay/penginapan, pajak restoran, hiburan, reklami, parkir, sarang burung, pajak bumi bangunan dan air tanah. Langkah-langkah yang dilakukannya antara lain studi terhadap potensi pendapatan asli daerah, pendataan dan penilaian terhadap potensi pendapatan asli daerah, merivisi dan mengevaluasi regulasi yang berkaitan dengan pajak retribusi yang tidak sesuai lagi. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau juga melaksanakan penegakan hukum agar tertib dan tepat waktu untuk membayar pajak. Dimana suatu instansi atau seseorang diingatkan akan kewajiban pajaknya dengan diberikan surat tagihan dan teguran jika terjadi keterlambatan dalam membayar pajak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio ekonomis pada Pemerintah Daerah



# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.4, No.1, April 2020, pp. 1 – 10

ISSN2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage:<http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Kabupaten Berau yang telah dianalisis berdasarkan rasio ekonomis *value for money* selama tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah rata-rata sebesar 69% masuk kedalam kategori ekonomis ( $69\% < 100\%$ ). Berdasarkan hasil analisis, pengeluaran atau belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau tidak melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga tingkat biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan suatu kegiatan ekonomis tidak melebihi dari apa yang telah ditetapkan.

2. Rasio Efisiensi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau selama tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah rata-rata sebesar 96% masuk ke dalam kategori efisien ( $96\% < 100\%$ ). Berdasarkan hasil analisis, Realisasi Pengeluaran dan Realisasi Pendapatan yang didapat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau masih fluktuatif. Pada tahun 2015 Rasio Efisiensi mencapai 126% dimana jika ( $126\% > 100\%$ ),, pada tahun 2016 menurun akan tetapi masih lebih dari 100% ( $103\% > 100\%$ ) dan disimpulkan tidak efisien. Meskipun adanya fluktuasi efisiensi tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau pada tahun 2018 ini telah menurunkan rasio efisiensi 78%. Dengan begitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Efisien.
3. Rasio Efektivitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah rata-

rata sebesar 104% masuk ke dalam kategori efektif ( $104\% > 100\%$ ). Berdasarkan hasil analisis Realisasi Pendapatan dan Anggaran Pendapatan yang drencanakan dan diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau cukup stabil. Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 97% berbanding terbalik dengan tahun 2014 sebesar 114% yang dimana jika ( $114\% > 100\%$ ) diungkapkan efektif. Pengelolaan pelaksanaan program pemerintah diungkapkan cukup baik karena anggaran pendapatan yang diperoleh tidak jauh berbeda dari apa yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

## Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, saran yang dapat diberikan bagi peneliti yaitu :

1. Diharapkan rasio ekonomis yang dicapai oleh Pemerintah Daerah dapat dipertahankan dan lebih ditekan lagi pengeluaran- pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
2. Rasio efisiensi yang dicapai oleh Pemerintah Daerah masih berfluktuatif dimana realisasi belanja yang lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diperoleh, diharapkan realisasi belanja lebih ditekan lagi dan pendapatan daerah lebih ditekankan lagi melalui intensitas penagihan pajak yang sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Berau.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.4, No.1, April 2020, pp. 1 – 10

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

3. Rasio efektivitas yang dicapai oleh Pemerintah Daerah cukup stabil meskipun ada penurunan diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dari anggaran Pendapatan yang direncanakan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan di beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia diharapkan sebagai pembanding kinerja antar Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldy H. R. Pangkey, Ivonne S. Saerang, dan Joy E. Tulung, 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA* 5 (2) November: 2848-2858.
- Fitriani lisa. 2013. Tingkat Kemandirian Keuangan Dearah (Otonomi Fiskal) Pemerintah Kabupaten Berau. Skripsi, STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, 72-74.
- Fokusindo Mandiri, 2017. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan ke-3, Bandung.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Kedua, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Terbaru. ANDI, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, STIM YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama, STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2017. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Mulyanigtyas, 2018. Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto Dengan Pendekatan *Value For Money*, *Jurnal PRIVE 1* (1) Maret: 1.
- Pura, Rahman. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Suryantini, Ni Putu Santi, Ni Putu Ayu Darmayanti, dan Ica Rika Candraninggrat, 2017. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Prosiding Seminar Nasional AIMI di Jambi*, Oktober: 428-432.
- Samryn, 2014. *Pengantar Akuntansi*. Edisi IFRS, Rajawali Pers. Jakarta.
- Syakur, 2015. *Intermediate Accounting*. Edisi Revisi, AV Publisher. Jakarta.
- Sartono, Ali. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 Berdasarkan Konsep Value For Money. Skripsi, STIE Widya Wiwaha, Maret: 59.